
JEJAK EKONOMI KOLONIAL PADA LANSKAP BUDAYA DI KUANTAN

Indriani, Fadhilah Ariani

SMAN 1 Singingi
UIN Sunan Kalijaga

Email: pamudjiindriani@gmail.com
Email: fadhilaharianii@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara sejarah ekonomi kolonial dan lanskap budaya masyarakat Kuantan, Riau. Sejak abad ke-19, Sungai Kuantan menjadi koridor vital dalam distribusi komoditas kolonial, terutama karet, yang mengintegrasikan daerah pedalaman dengan jaringan perdagangan kolonial Belanda. Di balik fungsi ekonominya, sungai juga menjadi arena interaksi sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi kolonial membentuk struktur sosial-ekonomi Kuantan, serta bagaimana warisan dari periode tersebut bertransformasi dan berpotensi sebagai Cagar Budaya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan memadukan analisis arsip kolonial, literatur sekunder, wawancara tokoh lokal, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur kolonial rumah kontrolir, kompleks kantor pemerintahan, pasar, rumah sakit, masjid, dan jaringan pemukiman menjadi bagian dari lanskap budaya Kuantan yang menjadi sumber identitas, memori kolektif, dan potensi pelestarian budaya. Namun ada pembangunan ulang terhadap elemen lanskap tanpa mempertimbangkan nilai warisan sehingga mengaburkan jejak material yang seharusnya dapat berfungsi sebagai sumber sejarah dan bagian dari memori kolektif masyarakat. Temuan ini memperkaya historiografi lokal serta memberikan implikasi penting bagi pelestarian Cagar Budaya di Kuantan.

Kata Kunci: cagar budaya; ekonomi kolonial; Kuantan; lanskap budaya

TRACES OF COLONIAL ECONOMY IN THE CULTURAL LANDSCAPE OF KUANTAN

Abstract

This article examines the relationship between colonial economic history and the cultural landscape of the Kuantan community in Riau. Since the 19th century, the Kuantan River has been a vital corridor for the distribution of colonial commodities, especially rubber, integrating the interior with the Dutch colonial trade network. Beyond its economic function, the river also became an arena for socio-cultural interaction. This study aims to explain how colonial economic policies shaped the socio-economic structure of Kuantan, as well as how the legacy of this period has been transformed and has the potential to become a Cultural Heritage Site. The method used is a historical method that combines analysis of colonial archives, secondary literature, interviews with local figures, and field documentation. The results of the study show that colonial infrastructure, such as the controller's house, government office complex, market, hospital, mosque, and settlement network, became part of the cultural landscape of Kuantan, which is a source of identity, collective memory, and potential for cultural preservation. However, there has been redevelopment of landscape elements without consideration for their heritage value, obscuring material traces that could serve as historical sources and part of the community's collective memory. These findings enrich local historiography and have important implications for the preservation of Cultural Heritage in Kuantan.

Keywords: colonial economy; cultural heritage site; cultural landscape; Kuantan

I. PENDAHULUAN

Kajian mengenai sejarah perekonomian masyarakat lokal selalu menuntut perhatian pada keterkaitan erat antara ekologi, budaya, dan struktur sosial. Hal ini terlihat jelas pada masyarakat Kuantan, Riau, yang sejak masa lalu menjadikan sungai sebagai pusat kehidupan ekonomi dan sosial. Kuantan merupakan nama bagi daerah-daerah yang berada di sepanjang tepi Sungai Kuantan (Batang Kuantan). Sungai Kuantan adalah nama sungai untuk Sungai Indragiri pada bagian hulu yang melintasi daerah-daerah Kuantan, ketika memasuki wilayah Indragiri sungai ini bernama Sungai Indragiri (BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2007). Sungai Kuantan bukan hanya berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan, melainkan juga menjadi medium budaya yang melahirkan tradisi kolektif, salah satunya Pacu Jalur.

Pacu Jalur merupakan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) (Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, 2025) yang berfungsi sebagai ritual budaya sekaligus hiburan rakyat yang terkait erat dengan peringatan hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan. Pada tahun 2025, tradisi ini menjadi *viral* melalui fenomena digital—video “aura farming” oleh anak pacu di media sosial, mengangkat Pacu Jalur ke ranah internasional. Ribuan pengunjung, baik lokal maupun dari luar daerah, hadir menyaksikan perhelatan tersebut. Kehadiran massa dalam jumlah berdampak signifikan pada sektor ekonomi lokal melalui pariwisata, perputaran usaha kecil-menengah, hingga promosi identitas daerah. Fenomena ini memperlihatkan kesinambungan sejarah perekonomian masyarakat Kuantan, di mana hubungan antara alam, budaya, dan ekonomi tidak pernah terputus, melainkan mengalami perubahan bentuk dan makna sesuai dengan konteks zamannya.

Sebagai poros utama, Sungai Kuantan sejak dahulu tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan sumber kehidupan, tetapi juga menjadi penentu terbentuknya lanskap budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Interaksi manusia dengan sungai dan hutan di sekitarnya menciptakan pola mata pencarian yang khas, dikenal dengan istilah “tapak lapan”, sebuah sistem ekonomi yang terintegrasi dengan alam (Hamidy, 1983). Kedatangan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 membawa perubahan fundamental. Sungai Kuantan yang sebelumnya merupakan jalur internal, menjadi sarana perhubungan utama antara *Sumatra's Westkust* dengan *Sumatra's Oostkust* melalui Taluk di Kuantan dan Rengat di Indragiri Hulu (Ligtvoet, 1909). Sungai Kuantan dan daerah sekitarnya mengalami transformasi besar. Kebijakan kolonial yang berorientasi pada produksi dan distribusi komoditas (terutama karet) memengaruhi sistem perdagangan, struktur sosial, serta pola pemukiman. Perubahan ini meninggalkan jejak berupa infrastruktur kolonial sekaligus mendorong terbentuknya lanskap budaya Kuantan.

Studi tentang dampak kolonialisme terhadap lanskap budaya, dan Kuantan sendiri masih terbatas. Kajian yang dilakukan oleh Arman (2023), membahas dampak perkebunan karet terhadap kebangkitan sosial ekonomi daerah Indragiri. Tulisan Indriani (2019), mengkaji hubungan Kuantan dengan Kerajaan Indragiri dan Minangkabau pada masa Kolonial Belanda. Artikel Aditya et al., (2024) menyoroti kebijakan ekonomi kolonial, seperti sistem tanam paksa dan dominasi sektor perkebunan yang mengubah pola produksi, tenaga kerja, dan menyebabkan eksploitasi masyarakat

lokal dan ketidakadilan sosial ekonomi. Padmo (1995) dalam tulisannya menyebutkan penelitian terdahulu tentang ekonomi perkebunan dan berbagai aspek dari sektor yang unik dari sistem kolonial. Seperti The Kian-Wie (1977) yang menulis sumbangan perkebunan tembakau, karet dan kelapa sawit terhadap perkembangan regional. Ia menemukan jurang yang memisahkan antara perkebunan milik perusahaan swasta dan perkebunan rakyat kecil. K. J. Pelzer (1982) memberikan gambaran yang lebih bulat tentang perkembangan hubungan agraris antara perusahaan perkebunan dan masyarakat Sumatra Timur. Namun, artikel-artikel tersebut belum ada yang menganalisis bagaimana dinamika ekonomi pada masa kolonial Belanda membentuk dan mengubah lanskap budaya Kuantan.

Lanskap budaya dapat dipahami sebagai “karya gabungan alam dan manusia”, beberapa lanskap dirancang dan diciptakan secara sengaja oleh manusia, sementara yang lain berkembang secara organik. Kebanyakan lanskap saat ini mengalami degradasi akibat pengembangan infrastruktur yang tidak terencana dan urbanisasi, modernisasi teknik penggunaan lahan, dan sebagainya. Di daerah pedesaan, lanskap ditinggalkan atau kekurangan tenaga pengelola, akibat penurunan populasi, penuaan penduduk, dan perubahan dalam cara hidup tradisional dan sistem pengetahuan. Selain faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia, risiko bencana yang meningkat dan dampak perubahan iklim juga menimbulkan ancaman baru bagi lanskap budaya di seluruh dunia. Untuk melindungi lanskap budaya dunia yang menghadapi ancaman tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang nilainya, sambil memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelolanya secara berkelanjutan dengan cara yang spesifik untuk setiap lokasi, dengan mempertimbangkan bahwa setiap lanskap menghadapi tantangan yang berbeda (Rössler & Lin, 2018).

Jejak ekonomi kolonial di Kuantan dimulai secara signifikan setelah penaklukan Belanda dan penerapan *Korte Verklaring* (1905–1907), yang kemudian mencapai puncaknya pada masa “Ledakan Karet” (1910-an hingga 1920-an). Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana transformasi ekonomi kolonial Belanda membentuk struktur sosial-ekonomi dan lanskap budaya masyarakat Kuantan. Dalam usaha mewujudkan tulisan ini, penulis telah melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan terutama berupa wawancara (sumber lisan) dengan beberapa orang tokoh yang terlibat langsung maupun yang menjadi saksi pada masa Belanda berkuasa di Kuantan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah: Abdul Gani pensiunan guru SD di Jake, Ali Hasan pekerjaan petani karet di Jake, Abdul Yakin pensiunan PU Taluk Kuantan. Sumber tertulis (dokumen) yang digunakan berupa arsip, yaitu laporan serah terima jabatan *Memories van Overgave A Stuurman, Afdeeling Indragiri 2 Mei 1932*, Arsip koleksi *Binnenland Bestuur, R 28/15/19 Totaal der bestuursuitgaven* dan *BB 245 Nota van de afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten betreffende de toevoeging van een gedeelte der Ooskust van Sumatra bij het gouvernement Midden Sumatra (Sumatra's Westkust + Riouw*. Selanjutnya ada *Mededeelingen Betreffende De Kwantan-Districten, Rapport betreffende een onderzoek naar In Te Voeren Stoomvaartdiensten op Rivieren in Midden-Sumatra, Indragiri Het Zonnige Zuiden Het Land Der*

Toekomst, Nota over den politieken en economischen toestand van het landschap Kwantan, dan De Bevolkingsrubbercultuur in Nederlandsch-Indie VI. Riouw en Onderhoorigheden, Oostkust van Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden. Landsdrukkerij.

Sumber-sumber itu antara lain diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta dan Perpustakaan Nasional Jakarta. Pemenuhan informasi foto diperoleh salah satunya melalui koleksi digital KITLV. Semua data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan sub tema, diintegrasikan sesuai dengan tujuan penelitian, dan disusun menjadi sebuah narasi sejarah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya pada historiografi lokal, tetapi juga sebagai dasar informasi untuk pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya yang terkandung dalam lanskap budaya daerah ini.

II. PEMBAHASAN

Pada tahun 1905 Belanda berhasil menguasai Kuantan, di mana sebelumnya Kuantan merupakan bagian dari Kesultanan Indragiri. Akibat kekalahan Kuantan menghadapi Belanda dipaksakanlah *Korte Verklaring* kepada Kuantan di bawah pimpinan Raja Hasan yang ditandatangani tanggal 21 Oktober 1905 dan 14 Februari 1907. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menetapkan status Kuantan sebagai *zelfbestuurende landschappen* (swapraja) yang merupakan bagian dari Keresidenan Riau yang berpusat di Tanjung Pinang dan wilayah Kuantan terdiri dari 5 (lima) distrik, yaitu: Distrik Empat Koto di Mudik, Distrik Lima Koto di Tengah, Distrik Lima Koto di Hilir, Distrik Empat Koto Gunung dan Distrik Tiga Koto (Samin, 2006). Distrik Kuantan secara umum dengan ibukotanya Taluk, yang lebih populer disebut Taluk Kuantan, menjadi ibukota dari *onderdistrik* Kuantan (ANRI R 28/15/19, n.d.).

Sebagai angkutan sungai, penduduk Distrik Kuantan menggunakan *belungkang* dan *jalur*. *Belungkang* dibuat di Indragiri dan dijual ke Distrik Kuantan, sedangkan *jalur* dibuat oleh penduduk Distrik Kuantan sendiri. Menurut O' Brien, penduduk di sebelah kanan aliran Sungai Kampar (yaitu Sungai Kuantan) selalu menggunakan istilah *jalur* untuk perahu yang mereka gunakan (*jalur* terbuat dari pohon yang dilubangi dengan ketinggian selebar papan), untuk ukuran yang lebih besar yang digunakan untuk perdagangan disebut dengan *belungkang*. *Belungkang-belungkang* ini digunakan sebagai alat transportasi dari pasar-pasar ke berbagai daerah. Pada akhir tahun 1924 tercatat antara Rengat, Cerenti dan Taluk terdapat ± 60 *belungkang* yang dapat memuat 200 pikul dan ± 100 sampan sebagai alat transportasi (Nooteboom, 1932).

Keragaman mata pencarian pada masyarakat Kuantan pada dasarnya terdiri dari delapan macam mata pencarian yang dikenal dengan istilah '*tapak lapan*'. Adapun kedelapan mata pencarian itu adalah: (1) *Beladang*, "berladang" menanam padi di ladang dan sawah; (2) *Bakobun*, "berkebun" getah, di samping berkebun tanaman muda, palawija; (3) *Bataronak*, "beternak" memelihara binatang ternak; (4) *Mengusahakan niro*, "menggambil air nira" dari batang enau; (5) *Batukang*, "bertukang"; (6) *Baniago*, "berniaga/berdagang"; (7) *Bapakarangan*, membuat peralatan

menangkap ikan, menjadi nelayan; dan (8) *Mandulang*, mencari emas dengan dulang (Hamidy, 1983). Setiap jenis mata pencaharian tersebut mempunyai beberapa peraturan tentang peralatan yang digunakan dan tata cara pelaksanaan. Peralatan dan cara itu dipengaruhi oleh lingkungan dan sumber daya yang akan diolah, sehingga menimbulkan berbagai macam teknologi.

Sebelum Belanda menduduki daerah Kuantan sebenarnya penduduk Kuantan sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, begitu pula dengan penghasilan raja-raja daerah tersebut. Tetapi ketika Belanda menduduki Kuantan, penghasilan raja-raja menjadi berkurang karena tidak lagi memperoleh pembagian pendapatan dari barang-barang perdagangan yang dilarang (*illegal*). Perkembangan ekonomi di desa-desa pedalaman di Distrik Kuantan kurang berkembang karena faktor sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai, kondisi ini sangat berbeda dengan ibu kota Taluk Kuantan yang mengalami kemajuan; jalan-jalan dikerjakan dan diperbaiki agar keamanan orang dan barang terjamin, begitu pula dengan pengolahan tanah mengalami kemajuan. Penduduk dari dalam dan luar Kuantan membawa barang-barang dagangan ke pasar-pasar (Grondgeland, 1910).

Daerah-daerah di sepanjang sungai Kuantan memiliki pasar sendiri dan hari pelaksanaan yang berbeda mengikuti alur sungai. Terdapat 9 pasar yang kemudian dilengkapi dengan los-los, yaitu pasar Lubuk Ambacang (setiap Sabtu), Lubuk Jambi (Minggu), Gunung Toar (Senin), Benai (Selasa), Taluk (Rabu), Gangsal (Jumat), Basrah (Sabtu), Inuman (Minggu), dan Cerenti (Senin) yang penghasilan setiap bulan di pasar-pasar ini kira-kira f 25.000 per bulan. (Schwartz, 1893) Pembangunan los-los pasar di 9 lokasi ini menunjukkan kronologi formalisasi sistem pasar oleh Belanda.



Gambar 1. (a) Pasar Taluk tahun 1927, (b) Pasar Baserah Tahun 1927.
Sumber: KITLV

Selain di dalam wilayah Kuantan dan Indragiri Hulu, sudah terlaksana juga secara rutin lalu lintas pasar dengan daerah Sijunjung, Muara Lembu dan Logas (Kampar Kiri). Hubungan dagang Kuantan-Indragiri sudah berlangsung sejak adanya Kerajaan Indragiri, di mana barang-barang dagangan dibawa dengan perahu di sepanjang sungai Kuantan/Indragiri. Seluruh perdagangan berorientasi ke Singapura melalui Rengat (ANRI BB 245, n.d.).

Tabel 1. Daftar Ekspor Komoditi Dari Indragiri Tahun 1923/1924 (Termasuk Kuantan)

No	Barang Dagangan	Tahun 1923	Tahun 1924
1.	Karet	4.953 ton	6.494 ton
2.	Gambir	696 ton	206 ton
3.	Kopra	10.310 ton	9.595 ton
4.	Rotan	961 ton	939 ton
5.	Kulit pohon	4.346 ton	3.195 ton
6.	Kayu bakar bakau	22.448 ton	29.900 ton
7.	Sagu	5.513 ton	9.175 ton
8.	Ternak pengangkut	-	95 ton
9.	Ikan	407 ton	529 ton
10.	Bambu dan kerajinan bambu	84 ton	29 ton
11.	Beras dan padi	760 ton	174 ton
12.	Damar	64 ton	30 ton
13.	Berbagai macam buahan	227 ton	493 ton
14.	Daun nipah	84 ton	-
15.	Produksi lain	223 ton	16 ton
16.	Jumlah total	52.000 ton	62.000 ton

Sumber: Slotemaker, 1926

Pada tahun 1920-an, sebagian besar penduduk Kuantan dan Indragiri Hulu mengganti mata pencaharian mereka dari bertani padi menjadi bertanam karet (Vlekke, 2008). Kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Kuantan pada awal abad ke-20 berfokus pada integrasi daerah pedalaman ke dalam sistem pasar dunia melalui komoditas ekspor, terutama karet (lihat Slotemaker 1926; Vlekke 2008). Transformasi Kuantan dengan kebijakan ekonomi kolonial yang berorientasi pada ekspor karet ini mengubah Sungai Kuantan dari jalur internal menjadi arteri penghubung *Sumatra's Westkust* dengan *Sumatra's Oostkust* melalui Taluk dan Rengat, mengintegrasikan pedalaman ke jaringan perdagangan global yang berpusat di Singapura yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi liberal Hindia Belanda.

Tabel 2. Ekspor Karet Dari Residensi Riau Dan Daerah Takluknya Tahun 1924

No	Daerah	Karet Perusahaan	Karet Rakyat	Jumlah
1.	Indragiri	1.074 ton	5.450 ton	6.524 ton
2.	Daerah-daerah di Riau selain Indragiri	1.090 ton	500 ton	1.590 ton
3.	Seluruh Residensi Riau	2.164 ton	5.950 ton	8.114 ton

Sumber: Slotemaker 1926

Bagian terbesar produksi karet rakyat dari daerah Riau dan daerah takluknya berasal dari *Afdeeling* Indragiri. Daerah produksi karet di sini adalah Indragiri Hulu dan Distrik Kuantan sebagai penghasil terbanyak. Karet merupakan hasil terbesar dari daerah Kuantan untuk pasar luar negeri yaitu di Singapura. Tidak satu pun dari karet alami itu pengangkutannya dapat dilakukan secara langsung dari daerah di sepanjang Batang Kuantan langsung melalui laut menuju Singapura. Tetapi pengangkutan harus dilakukan melalui Rengat, karena Rengat sudah memperoleh hak dagang dan hubungan kapal yang teratur dengan Singapura. Ekspor karet dari Residensi Riau dan Daerah Takluknya berdasarkan laporan dari berbagai kantor pelabuhan pada tahun 1924 terlihat pada tabel di atas (Slotemaker, 1926).

Jika dilihat dari perkembangan tanaman karet di daerah Kuantan tercatat selalu terjadi peningkatan; pada tahun 1919 jumlah pohon karet yang berproduksi di *afdeeling* ini diperkirakan 1.600.000 pohon, pada tahun 1928 kebun karet yang belum disadap diperkirakan 12-15 juta pohon. Pada tahun 1928 harga karet merosot per pikul f 40, hal ini dianggap tidak memadai untuk menderes getah di kebun-kebun baru. Pada saat itu penduduk menderes karet hanyalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup primer dan membayar pajak. Ketika harga karet merosot petani secara intensif kembali menggarap ladang dan sawah mereka, tetapi mengalami kesulitan karena tanah yang terbengkalai telah berubah menjadi padang ilalang (Obdeijn, 1927). Di negeri Cerenti, Luhak Nan Balimo, Simandolak, Sentajo, Jake dan Lubuk Jambi untuk mengatasi hal itu dilakukan penanaman percobaan untuk menyingkirkan ilalang ini dengan jenis rumput *krotolaria*. Sampai akhir tahun 1930 penduduk masih meneruskan penanaman pohon karet muda meskipun ada kemerosotan harga (Stuurman, 1932).

Karet dibawa oleh pedagang Melayu dari kebun-kebun dengan menggunakan perahu dan diperdagangkan ke pasar-pasar setiap minggu. Di pasar-pasar Kuantan, pedagang-pedagang Cina yang merupakan agen dari eksportir Cina di Rengat membeli karet dari penduduk, di Rengat sendiri karet yang diperdagangkan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Kuantan. Pedagang Cina mengikat leveransir-leveransir mereka dengan persekot, kemudian mereka harus membayarnya dengan menjual karet kepada pedagang Cina tersebut. Perbedaan pembelian terjadi karena perbedaan pemberian persekot, ini merupakan taktik pedagang Cina, sehingga lambat laun pedagang pribumi menjadi tergantung kepada pedagang Cina. Pedagang-pedagang kecil banyak dilakukan oleh orang Minangkabau yang menyebar di setiap pasar (Slotemaker, 1926). Kemunculan pedagang Tionghoa dan ketergantungan pribumi dengan taktik pedagang Tionghoa yang diikat persekot, yang secara tidak langsung didukung oleh sistem perdagangan kolonial untuk memuluskan aliran komoditas. Hal ini adalah implementasi dari kontrol dagang kolonial.

Daerah Taluk merupakan pusat kegiatan ekonomi dari hasil produksi penduduk setempat. Dalam perkembangan fisik kota, pertumbuhan distrik Kuantan bisa dilihat dengan menyusuri daerah bagian hulu dan di tepi sungai sepanjang sungai Kuantan, ini berkaitan dengan fungsi sungai Kuantan sebagai jalur perdagangan. Penduduk umumnya tinggal di rumah-rumah yang terletak di tepi sungai baik di kota maupun di kampung (Obdeijn, 1927). Peranan sungai sebagai

sarana transportasi dan perdagangan ini menumbuhkan kota-kota dagang dan kota pelabuhan di kiri kanan sungai. Tetapi setelah pemerintah kolonial belanda membuka jalan-jalan darat (jalan raya) mengakibatkan pola pemukiman penduduk dan perkembangan kota mulai berkembang mengikuti perkembangan jalan raya.

Rumah-rumah di daerah Kuantan dibangun menurut gaya rumah Minangkabau. Sebagian besar rumah ini terdiri atas sebuah ruangan besar dengan kamar tertutup. Atapnya dari kanan ke kiri berbentuk runcing pada ujung kirinya, ini merupakan perumpamaan asal usul orang Kuantan yang berasal dari tanah Minangkabau kemudian menurun ke lembah. Rumah-rumah tersebut dinamakan dengan *rumah bepahat* dengan model sekeliling dinding terbuat dari kayu (Grondgeland, 1910). Masyarakat Kuantan masih sering meminta jasa seorang dukun untuk menentukan letak dan arah rumah tempat tinggal yang paling menguntungkan, sehingga letak rumah di kampung tidak memiliki posisi yang teratur. Jalan-jalan berkelok-kelok melalui kampung, bahkan juga melewati berbagai rumah. Rumah-rumah milik kepala kampung hampir sama dengan milik penduduk umumnya, hanya sedikit lebih besar dan lebih lengkap. Selama periode *ledakan karet* banyak rumah baru dibangun dan hampir semua rumah mempunyai atap seng yang merupakan barang yang cukup mewah pada masa itu. Sebaliknya sebagai akibat dari krisis ekonomi (*malaise*), rumah penduduk tidak lagi dirawat (Stuurman, 1932).

Masuknya para pedagang asing baik lokal maupun dari luar telah membawa perubahan dalam bentuk pola pemukiman daerah. Di beberapa tempat muncul kompleks pemukiman yang dipisahkan berdasarkan klasifikasi etnis mereka, seperti kampung Cina yang tumbuh di setiap kota dengan komunitas penduduk Cina cukup besar. Kampung Cina ini bukan hanya menjadi daerah pemukiman, namun juga berfungsi sebagai sentra kehidupan ekonomi setempat mengingat para pelaku ekonomi lokal didominasi oleh orang-orang Cina itu. Begitu juga dengan pemukiman orang Minangkabau dan orang Jawa yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi mereka. Di luar kota seiring dengan tumbuhnya sektor perkebunan dan pertambangan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tumbuh pemukiman kuli kontrak yang didatangkan dari luar. Sebanyak 500-600 orang kuli Cina didatangkan bagi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan lada dan gambir selama akhir abad ke-19. Di samping itu juga perusahaan Gading Estate yang terlibat dalam perusahaan pengeboran minyak di Indragiri telah mendatangkan para kuli Cina sebagai tenaga kerja mereka (Juwono & Hutagalung, 2006).

Setelah habis masa kontrak kerja, para kuli kontrak Cina banyak yang pindah ke daerah Kuantan. Di Kuantan, pemukiman orang Cina lebih terpusat di Taluk, mereka umumnya tinggal di pusat perdagangan (pasar) yang berada di tepi Sungai Kuantan. Di pasar Taluk toko-toko (kedai-kedai) dibangun berderet bertingkat dua semi permanen, ada toko milik orang Cina, orang Minangkabau dan Arab/India, pada tingkat atas toko difungsikan juga sebagai penginapan bagi pedagang-pedagang dari luar daerah. Di toko-toko tersebut mereka menjual barang-barang kelontong, sepeda dan elektronik, makanan dan minuman, tempat menampung hasil bumi dari penduduk sekitar, bahan bangunan, bahan pakaian, emas dan lain-lain (Hasan, 2012).

Pemerintahan Hindia Belanda di Kuantan mempunyai dinas pekerjaan umum sendiri yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala (dalam sebutan lokal disebut *opsekel*). Selain membuat dan memelihara jalan-jalan serta jembatan-jembatan, dinas pekerjaan umum ini juga bertugas mengerjakan pembangunan kantor-kantor dan rumah-rumah kepunyaan swapraja, los-los pasar, tanah lapang, dan sebagainya (Sutan, n.d.). Pembangunan infrastruktur fisik di Taluk sebagai ibu kota *Districten Kuantan* adalah implementasi dari kebijakan administrasi dan fiskal kolonial untuk mengamankan dan memfasilitasi eksploitasi ekonomi dan penarikan pajak. Pemerintahan kolonial berpengaruh terhadap terbentuknya pola perkotaan modern yang memiliki komponen-komponen berikut: (A) rumah kontrolir; (B) kantor kontrolir; (C) kantor telegraf dan kantor pos; (D) kantor polisi; (E) vila/pesanggrahan; (F) rumah sakit; (G) gedung pertemuan *kepalo-kepalo nagori*; (H) Masjid Koto; (I) pemukiman lama Kampung Koto; (J) Pasar Taluk; (K) Masjid Raya; (L) penjara; (M) Lapangan Limuno; (N) lapangan olahraga; (O) jalan raya Taluk ke Rengat (ANRI R 28/15/19, n.d.).



Gambar 3. Ilustrasi Peta Lanskap Wilayah Taluk.
Sumber: Dokumen Pribadi

Sejak tahun 1928 di Taluk telah ada sebuah rumah sakit dengan seorang dokter. Di tempat-tempat yang dianggap perlu ditempatkan pula seorang pegawai bumiputra yang disebut mantri untuk menolong orang yang mendapat penyakit yang tidak memerlukan pemeriksaan seorang dokter seperti luka-luka, kudis, demam malaria, dan lain-lain (Sutan, n.d.). Poliklinik harian kemudian dibuka di Taluk, Sampit, Basrah dan Lubuk Jambi dengan menempatkan seorang mantri perawat berijazah di poliklinik itu (Stuurman, 1932).

Masjid Koto sebagai sarana peribadatan bagi umat Islam didirikan pada tahun 1910 di dekat rumah sakit, kemudian pada tahun 1914 dipindahkan ke lokasi sekarang (Hasan, 2012). Lokasi mesjid yang berada di tepi Sungai Kuantan ini sangat tepat, karena berada di tengah pusat pemukiman penduduk serta di tepi dermaga pelabuhan Sungai Kuantan tempat berlabuhnya kapal

dan naik turunnya penumpang. Banyaknya pedagang di pasar Taluk yang berasal dari Sumatra barat mempengaruhi berdirinya organisasi Muhammadiyah di Taluk. Jumlah penduduk pendatang (pedagang) yang cukup besar tidak dapat ditampung oleh Masjid Koto sehingga dibangunlah Masjid Raya, walaupun pada awalnya terjadi perselisihan karena ada masyarakat yang berpendapat hanya ada 1 mesjid untuk 1 negeri. Tapi perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Pada ayat 45 pada anggaran belanja kas *onderafdeeling* untuk tahun 1919 memeruntukkan f 1.500 untuk perawatan terhadap: sewa untuk bangunan kontrolir di Taluk (setelah sebuah bangunan tempat tinggal kontrolir diubah menjadi bangunan pesanggrahan) sebesar f 105; los pasar di Cerenti, Inuman, Basrah, Pangean, Benai, Taluk, Gunung, Lubuk Jambi dan Lubuk Ambacang (9 los pasar x f 50 = f 450), diusulkan los pasar ini akan menjadi milik umum (*eigendom*) dan dilakukan pengalihan peruntukkan terhadap biaya masuk; pesanggrahan di Cerenti, Basrah, Taluk, Lubuk Jambi dan Lubuk Ambacang termasuk usaha rumah pemandian sebesar f 360; pesanggrahan di Lubuk Ramo dan Logas adalah rumah negeri dan menjadi milik negeri ini, dari kantor *landschap* menjadi kantor kontrolir sebesar f 65; tiga kantor *landschap* untuk *Urang godang* di Taluk, Basrah dan Lubuk Jambi sebesar f 195, kantor-kantor ini menjadi kantor untuk Kepala Distrik dan Kepala Onder distrik; rumah sakit daerah di Taluk sebesar f 65; biaya gudang f 65; tempat penyembelihan hewan dan los daging menjadi perusahaan umum dengan biaya f 130, penjara daerah di Taluk sebesar f 65. Bangunan-bangunan tersebut kecuali los-los pasar, tempat pemotongan hewan dan los daging serta penjara daerah mendapat bantuan dari pemerintah sebesar f 855 per tahun (ANRI R 28/15/19, n.d.).

Sejak tahun 1899 ketika diadakan ekspedisi militer Belanda ke daerah Koto Kampar, daerah Bangkinang telah mempunyai hubungan telepon dengan Padang Darat. Hubungan telepon itu kemudian diteruskan ke Gunung Sahilan dan akhirnya ke Taluk. Dari Rengat ke Taluk pun kemudian diadakan hubungan telepon tidak lama setelah Kuantan diduduki tentara Belanda. Hubungan telepon itu mulanya diadakan oleh pihak militer untuk kepentingan keamanan, tetapi pemeliharaannya diserahkan kepada pangreh praja (Sutan, n.d.).

Lengkapnyafasilitas hubungan telepon, tersedianyapabrik karet untuk membeli getah beku dan getah tarik dan adanya perusahaan bank (yang didirikan dengan kas administrasi *landscap*) di Rengat, hal ini dapat memudahkan orang mentransfer melalui telepon, hanya dalam waktu 1 ½ jam uang langsung dapat diterima di kas *landschap* Taluk atas penjualan karetnya (Obdeijn, 1927). Kas-kas *landschap* juga sering memberikan bantuan uang dari Rengat ke daerah-daerah lain. Uang-uang tersebut kemudian disetor kepada kas Indragiri, sedangkan untuk biaya telepon dibatasi jumlahnya dan dibayar oleh kas Kuantan sebagai provisi. Setiap bulan dikirim lagi 100.000 gulden dengan cara demikian. Mengenai pertumbuhan pegadaian di Indragiri secara keseluruhan adalah lebih besar dari pada pegadaian di Siak dan Kampar Kiri (Obdeijn, 1927).

Tabel 3. Keuntungan dari Kas *Landschap* Indragiri dan Kuantan Tahun 1921-1926

No.	Tahun	Keuntungan	Tambahan Anggaran Belanja
1.	1921	f 234.433	Bertambah
2.	1922	f 216.778	Berkurang
3.	1923	f 252.264	f 35.486
4.	1924	f 308.825	f 56.561
5.	1925	f 346.905	f 38.080
6.	1926	f 591.000	f 224.095

Sumber: Obdeijn, 1927

Pada tabel di atas dapat dilihat keuntungan yang diperoleh dari kas *landschap* Indragiri dan Kuantan setiap tahun memperoleh keuntungan yang berpengaruh terhadap anggaran belanja, kecuali pada tahun 1922.

Ketika Kuantan dan Indragiri Hulu pada khususnya, Riau dan seluruh daerah karet pada umumnya kebanjiran uang pada tahun 1920-an, daya beli penduduk luar biasa meningkat. Penduduk pribumi sudah memakai sepatu, mengenakan pakaian yang baik, merokok dengan menggunakan rokok impor, penduduk sudah dapat membuat sendiri berbagai kue dengan baik dan membeli mercon pada hari-hari besar agama. Penduduk juga sudah mempunyai uang untuk membeli mobil, *motorboat* dan sepeda. Di toko-toko tersedia berbagai barang mewah, sepeda, pakaian-pakaian sutra dan wol, bola kaki, dan sebagainya. Di Distrik Kuantan sendiri sudah terdapat 70 mobil dari merk *Fords*, *Chevrolets*, *Overlands*, *Hudsons*, *Austins*, bahkan juga sudah ada *Lemousine* dan *Luxewagens*. Selain itu di daerah ini juga sudah terdapat *motorboat* yang jumlahnya lebih dari 12 buah pada tahun 1923 dan 33 *motorboat* tahun 1925. *Motorboat-motorboat* bernama “*Daphe*”, “*Renown*”, “*Repulse*”, dan lain-lain serta 3 *motorboat* pemerintah bernama “*Vera*” telah memiliki perlengkapan-perengkapan yang cukup mewah dengan fasilitas salon dan penerangan, sedangkan *motorboat* no 29 dan 146 fasilitasnya sangat sederhana. Sepeda yang diimpor jumlahnya luar biasa, pada bulan September 1925 berjumlah 1.100 sepeda dan hampir di setiap kampung terdapat sebuah sepeda merek mahal yaitu “*kinderfiets*” (Obdeijn, 1927).

Krisis ekonomi yang hebat di dunia pada tahun 1929 dan diikuti oleh zaman malaise bertahun-tahun lamanya, karet yang merupakan salah satu barang ekspor Indonesia yang terpenting tidak lagi habis terjual di pasaran dunia. Guna melindungi perusahaan-perusahaan karet milik maskapai bangsa Eropah, maka dikorbankanlah karet rakyat. Dari karet rakyat dipungut bea ekstra atas karet “*rubberfonds*”. Kemudian uang *rubberfonds* itu, yang dapat dipungut di Rengat, sebahagian diserahkan kepada negeri-negeri di Indragiri dan Kuantan untuk memperbaiki mesjid-mesjid dan pasar-pasar. Sisanya dipergunakan untuk biaya membuat jalan dari Rengat ke batas Indragiri dengan Kuantan dan mengganti jembatan-jembatan kayu di Kuantan dengan jembatan-jembatan besi (Sutan, n.d.).

Bersamaan dengan pembukaan kompleks administrasi kolonial, sejumlah jalan darat dibuka yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan juga di dalam kota sendiri. Jalan-jalan ini dibuka atas perencanaan yang disodorkan oleh pemerintah kolonial. Dengan adanya pembukaan jalan-jalan ini, pertumbuhan dalam sektor ekonomi berjalan cukup pesat dan membuka daerah pedalaman yang terletak jauh dari aliran Sungai Kuantan menjadi lahan bagi investasi modal asing yang masuk sejak akhir abad ke-19. Jalan-jalan tradisional yang sudah ada diperlebar dan diperbaiki, sehingga memudahkan sarana pengangkutan produk setempat. Hal ini tampak pada jalan penghubung antara Taluk, Peranap, Rengat, Tembilahan, Prigi Raja, Cenako dan Tembilahan. Dengan dibukanya jalan-jalan tersebut interaksi sosial semakin berkembang pesat dan kehidupan ekonomi menjadi meningkat. Para pedagang dari *Sumatra's Westkust* dan orang-orang Banjar semakin banyak berdagang dari daerah Minangkabau ke *Sumatra's Oostkust*. Sebaliknya para pedagang Cina semakin banyak yang mengadakan kunjungan ke daerah pedalaman dan dari Kuala Cenako sera Prigi Raja untuk membeli produk hutan dan pertanian masyarakat (Juwono & Hutagalung, 2006).

Setelah masa ekonomi kolonial berakhir, ruang-ruang peninggalan kolonial di Kuantan mengalami pergeseran makna dari simbol kekuasaan kolonial menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Namun, tidak semua bangunan fisik kolonial bertahan. Pasar Taluk dan pasar-pasar lain di sepanjang Sungai Kuantan dibangun pada awal abad ke-20 untuk menunjang perdagangan komoditas ekspor (Slotemaker, 1926) pasca kolonial, struktur pasar masih dipertahankan dan terus berfungsi sebagai pusat ekonomi rakyat. Meski bangunan fisiknya telah beberapa kali direnovasi, fungsi sosialnya sebagai ruang interaksi ekonomi dan budaya tetap berlanjut. Pasar kini menjadi ruang sosial yang mempertemukan masyarakat lintas etnis dan profesi, menandakan keberlanjutan nilai dari ruang ekonomi kolonial menjadi arena ekonomi rakyat modern. Hingga saat ini, Masjid Koto masih mempertahankan kesinambungan fungsi dan nilai spiritual sejak masa kolonial. Meski telah empat kali dipugar, bentuk arsitektur dan tata letaknya tetap memperlihatkan kesinambungan fungsi religius di tepi Sungai Kuantan. Selanjutnya bangunan kantor dan rumah kontrolir yang merupakan simbol dominasi administratif kolonial atas wilayah Kuantan (ANRI R 28/15/19, n.d.). Kedua bangunan ini menghadap Sungai Kuantan—menegaskan posisi sungai sebagai jalur kendali ekonomi kolonial. Namun pada tahun 2006, bangunan kantor dan rumah kontrolir ini dibongkar dan dibangun ulang oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi Wisma Jalur.



Gambar 3. (a) Wisma Jalur tahun 2011, (b) Wisma Jalur tahun 2025.
Sumber: Dokumen Pribadi

Rumah sakit juga telah dibongkar dan dibangun kembali menjadi bangunan baru pada tahun 2006. Walaupun bentuk kolonialnya telah hilang, lokasi dan fungsi sosialnya tetap sama yakni sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat Kuantan. Dalam kerangka *Cultural Landscape* UNESCO, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai *continuing landscape*, yaitu lanskap yang tetap memainkan peran sosial yang aktif dalam masyarakat kontemporer dan menunjukkan bukti material yang signifikan tentang evolusinya sepanjang waktu (Mitchell et al., 2009).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sungai Kuantan tidak hanya berperan sebagai jalur ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana interaksi antar etnis terjadi. Pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga pusat modernitas kolonial. Kenaikan daya beli, di mana penduduk membeli sepeda hingga mobil, adalah bukti nyata bagaimana ekonomi global mengubah gaya hidup dan identitas lokal. Kajian ini menunjukkan bahwa sejarah ekonomi kolonial Belanda di Kuantan tidak hanya mengubah struktur produksi dan perdagangan, tetapi juga membentuk lanskap budaya yang masih tersisa hingga kini. Belanda membangun kantor dan rumah pejabat (kontrolir) dan pasar di Taluk Kuantan untuk mengendalikan ekonomi dan administrasi. Kemudian ada pula masjid dan rumah sakit yang turut melengkapi fasilitas kolonial pada masa itu. Bangunan-bangunan ini secara fungsi sebagian masih bertahan hingga kini. Pembongkaran bangunan-bangunan kolonial seperti rumah dan kantor kontrolir serta rumah sakit pada tahun 2006 menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi lebih banyak bersifat material—membangun ulang bentuk baru di atas tapak lama—daripada pelestarian nilai sejarah dan arsitektur aslinya. Perubahan fisik lanskap kolonial di Kuantan ini menyisakan persoalan serius dalam konteks pelestarian sejarah. Kehilangan struktur kolonial tersebut berarti hilangnya lapisan visual dan spasial yang seharusnya dapat memperlihatkan kesinambungan sejarah ekonomi dan sosial Kuantan. Upaya pembangunan ulang tanpa mempertimbangkan nilai warisan telah mengaburkan jejak material yang seharusnya dapat berfungsi sebagai sumber belajar sejarah dan bagian dari memori kolektif masyarakat. Kondisi ini cenderung melemahkan autentisitas fisik, meskipun nilai sosialnya masih dipertahankan. Karena itu, refleksi terhadap kebijakan pelestarian di tingkat daerah menjadi penting agar transformasi ruang tidak menghapus sejarah yang membentuknya. Meski awalnya adalah simbol dominasi kolonial, kini lanskap kolonial dapat dipandang sebagai Cagar Budaya karena menjadi saksi transformasi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan begitu, jejak kolonial tidak hanya menjadi artefak mati, melainkan bangunan kolonial (Cagar Budaya) adalah wujud nyata bagaimana warisan kolonial bertransformasi menjadi sumber identitas, memori kolektif, dan potensi pelestarian budaya.

B. Saran

Kota Taluk Kuantan yang merupakan ibukota Kabupaten Kuantan Singingi dahulunya merupakan *Onder District* Kuantan pada masa kolonial Belanda, sehingga memiliki banyak bangunan peninggalan Belanda. Bangunan-bangunan kolonial tersebut seharusnya bisa menjadikan kota Taluk Kuantan sebagai salah satu objek wisata sejarah seperti Kota Tua di Jakarta. Namun karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, berakibat pada kesalahan pengambilan kebijakan dari pihak pemerintah daerah, di mana bangunan-bangunan kolonial tersebut direnovasi hampir secara keseluruhan yang menyebabkan hilangnya ciri-ciri fisik dan nilai sejarah bangunan tersebut. Apabila bangunan-bangunan peninggalan sejarah ingin dipugar, seharusnya dilakukan tanpa menghilangkan ciri khas dari zamannya. Penelitian ini menegaskan bahwa bangunan kolonial di Kuantan perlu dipandang sebagai satu kesatuan lanskap budaya. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya, serta memperkuat muatan lokal dalam pendidikan sejarah lokal di sekolah-sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F., Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). *Pengaruh kolonialisme terhadap struktur sosial dan ekonomi Indonesia*. 8(2).
- ANRI BB 245. (n.d.). *Nota van de afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten betreffende de toevoeging van een gedeelte der Oostkust van Sumatra bij het Gouvernement Midden Sumatra (Sumatra's Westkust + Riouw)*.
- ANRI R 28/15/19. (n.d.). *Totaal der bestuursuitgaven*.
- Arman, D. (2023). Perkebunan karet dan kebangkitan ekonomi di afdeeling Indragiri tahun 1920-An. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 12(1), 32–48. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2023.219>
- BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kuantan Singingi. (2007). *Kuantan Singingi dalam angka*.
- Grondgeland, A. (1910). Mededeelingen betreffende de Kwantan-Districten. In *Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie Zevende Volgreks–Negende Deel*. Martinus Nijhoff.
- Hamidy, U. U. (1983). *Kasin Niro penyadap enau rantau Kuantan*. Puslit Universitas Riau.
- Hasan, A. (2012, November 21). *Wawancara*.
- Indriani. (2019). Hubungan Kuantan dengan Kerajaan Indragiri dan Minangkabau pada masa kolonial Belanda (1905 - 1942). *Renjis: Jurnal Ilmiah Budaya Dan Sejarah Melayu*, 5(1). <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri>
- Juwono, H., & Hutagalung, Y. (2006). *Tiga tungku sejarangan: Sejarah Kesultanan Indragiri sampai peristiwa 5 Januari 1949*. Ombak.

- Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. (2025, July 9). *Tradisi pacu jalur; Menteri Kebudayaan dorong Warisan Budaya Takbenda Asli Indonesia ini mendunia*. <https://kemenbud.go.id/?p=66241>. <https://kemenbud.go.id/?p=66241>
- KITLV. (1927). Markt te Baserah bij Taloeck. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:890780>.
- KITLV. (1927). Markt te Taloeck. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:887542>.
- Ligtvoet, K. J. A. (1909). *Rapport betreffende een onderzoek naar In Te Voeren Stoomvaartdiensten op Rivieren in Midden-Sumatra*. Landsdrukkerij.
- Mitchell, N., Rössler, M., & Tricaud, P.-M. (2009). *World heritage cultural landscapes a handbook for conservation and management*. UNESCO world heritage centre.
- Nooteboom, C. (1932). *De Boomstamkano in Indonesie*. Boekhandel En Drukkerij Voorheen E.J. Brill.
- Obdeijn, V. (1927). *Indragiri het zonnige zuiden het land der toekomst*.
- Padmo, S. (1995). Ekonomi perkebunan dan keresahan di pedesaan: Sebuah survai awal. *Humaniora*, 2.
- Rössler, M., & Lin, R. C.-H. (2018). Cultural landscape in world heritage conservation and cultural landscape conservation challenges in Asia. *Built Heritage*, 2(3), 3–26. <https://doi.org/10.1186/BF03545707>
- Samin, S. M. (2006). *Pemutahiran adat Kuantan Singingi*. Alaf Riau.
- Schwartz, H. J. E. F. (1893). Nota over den politieken en economischen toestand van het landschap Kwantan. In *Tijdschrift voor Indische Taal, Land En Volkenkunde*. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- Slotemaker, C. G. (1926). *De Bevolkingsrubbercultuur in Nederlandsch-Indie VI. Riouw en onderhoorigheden, oostkust van Sumatra en Atjeh en onderhoorigheden*. Landsdrukkerij.
- Stuurman, A. (1932). *Memorie van Overgave Betreffende de Afdeeling Indragiri*.
- Sutan, J. L. (n.d.). Daerah Riau dari zaman ke zaman. In *Manuskrip*.
- Vlekke, B. H. M. (2008). *Nusantara sejarah Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.

